

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai konflik infrastruktur telah banyak dilakukan oleh beberapa tokoh dunia misalnya oleh Manowong dan Ogunlana, Tam dan Tong dan Spang dkk. Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan pentingnya peran komunitas masyarakat yang terkena dampak negatif pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan pemangku kebijakan yang menangani pembangunan infrastruktur tersebut (Rachmawan, 2016, hal. 195).

Pembangunan infrastruktur misalnya bendungan, dan jalan tol akan berdampak besar bagi perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Di China misalnya, pembangunan besar-besaran jalan tol dan jembatan yang menghubungkan antar provinsi berdampak besar bagi peningkatan kualitas ekonomi dan industri China. Hasilnya, China menjadi salah satu negara adikuasa baru di dunia. Ambisi China tersebut berujung pada kebijakan presiden Xi-Jinping untuk menyambungkan China dengan berbagai negara di dunia termasuk Asia Tenggara. Perwujudan ambisi ini terwujud dalam rencana proyek *One Belt One Road* (OBOR) yang diturunkan pada proyek bandara, pelabuhan, hingga jalan tol. Di Indonesia, pentolan proyek OBOR ini diwujudkan dalam proyek hydropower di Kalimantan Utara, ditambah berbagai proyek di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. termasuk Papua, Jambi, dan Riau. Dan yang utama jelas adalah proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung (Dewi Rina Cahyani (Jurnal Tempo), 2019).

Dengan demikian, jelas bahwa OBOR yang telah ditandatangani April 2019 ini oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan nilai

1.288 triliun ini merupakan agenda besar dan jangka panjang antara Indonesia dan China. Sebuah mega proyek yang sangat besar dan bertujuan mengangkat perekonomian dan teknologi transportasi di Indonesia. Kini Proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung yang sudah dimulai sejak 2016 ini sudah sampai 48,9% (Trio Hamdani (Jurnalis Detik), 2020).

Sejak awal proses pembangunan kereta cepat ini sudah menuai konflik atau pro-kontra. Bahkan sejak 20 Maret 2020 proyek ini resmi dihentikan sementara oleh Kementerian PUPR. Pro kontra yang terjadi banyak sekali termasuk dari sederet masalah yang terjadi misalnya, dampak yang ditimbulkan adalah adanya banjir akibat drainase yang buruk. Drainase yang buruk menimbulkan banjir di pinggiran tol Bekasi (Hanif Gusman (Jurnalis Tirto), 2020). Termasuk konflik ganti rugi lahan, AMDAL, hingga keraguan akan mahalannya tiket perjalanan jika sudah bisa dipergunakan yang tidak sesuai dengan kantong bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dampak dari adanya suatu proyek pembangunan infrastruktur juga menimbulkan dampak negatif yakni munculnya konflik. Dengan demikian, dampak dari adanya suatu proyek pembangunan infrastruktur juga menimbulkan dampak negatif yakni munculnya konflik. Hal ini karena pada dasarnya pembangunan secara fisik adalah adanya potensi konflik pertanahan dan permukiman karena harus memindahkan manusia dalam jumlah besar. Lebih lanjut, besarnya konflik juga karena secara mendasar selalu berkaitan dengan nilai dasar dalam kehidupan yakni ruang, ekspresi manusia, hingga sumber daya yang berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup, ekonomi, dan kemakmuran

(Kolars, 2009, hal. 77). Oleh sebab itu, potensi konflik dari suatu pembangunan amat sangat besra sekali dan sangat krusial bagi warga masyarakat yang terdampak.

Konflik yang sering terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah konflik prakonstruksi atau prosesual dimulai dari penentuan lahan, tanah, hingga pembangunan konstruksi. Dampaknya tidak hanya bermotif ekonomi semata, tetapi juga konflik kepentingan antar elemen masyarakat terkait yaitu pemerintah dan masyarakat, atau bahkan masyarakat dengan masyarakat kembali. Kesemuanya merasa dirugikan dan ingin memperoleh keuntungan atas nama keadilan. Konflik-konflik yang terjadi juga harus diselesaikan dengan resolusi-resolusi yang nyata yang harusnya tidak terjadi lagi dalam proyek pembangunan kedepan.

Jika berangkat pada paradigma konflik, konflik yang terjadi merupakan akibat perbedaan kepentingan antar masyarakat. Bisa antara pengusaha atau pemilik modal sebagai penanam modal suatu pembangunan, penguasa atau pemerintah dengan segala aturan dan kebijakannya yang mengatur dan membantu proses perwujudan pembangunan, serta masyarakat yang menjadi objek suatu pembangunan. Ketiga kelompok ini dalam perspektif konflik selalu bersitegang saling memperebutkan kepentingannya demi keuntungan bersama.

Dampak lain adalah dampak sosial masyarakat, terutama adanya sikap pragmatis. Pragmatisme ini terlihat dari adanya keinginan dari masyarakat dalam bersikap yang ingin instan dalam menyelesaikan solusi. Seringkali hal ini hanya ingin diukur dari kerugian bersifat materil, padahal sikap-sikap sosial dan

kerjasama yang mengakar dan perlu proses panjang seharusnya wajib dilakukan. Hal ini bisa dianggap salah karena seharusnya sikap yang perlu dikedepankan dalam konflik berjangka panjang ini adalah proses yang panjang yang mengedepankan keuntungan pada semua pihak, bukan hanya pada sebelah pihak.

Pragmatisme memandang pernyataan atau suatu tindakan yang sifatnya praktis, selalu mengarah ke hal hal yang pragmatis, yang harus dilakukan dengan mudah, dilakukan dengan gampang, dan menyelesaikan masalah dengan hasil yang dapat dilihat cepat sebagai takaran “berhasil dengan memuaskan”. Konsekuensinya, segala ide, pemikiran, konsep, teori yang sifatnya tidak berlawanan langsung.

Dalam realitas kehidupan idealisme yang ada pada diri kita tentang segala sesuatu yang benar, yang baik, dan bernilai yang harus dicapai, masyarakat harus hidup dengan cara yang bijak sehingga bisa hidup seturut dengan kondisi masyarakat. Dengan kata lain seseorang perlu hidup sampai ada suatu titik pragmatis. Masyarakat akan sangat kesulitan dan terjepit jika hidup dalam konstruksi pemikiran yang idealis sepanjang waktu. Namun tidak berarti bahwa masyarakat boleh berlawanan dengan idealism untuk berada dalam pragmatism total. Di sinilah letak paradox kebenaran antara pragmatism dan idealis.

Dengan kata lain pragmatism terlalu mengabaikan stabilitas dan keteraturan yang memang ada dalam masyarakat di samping menjadi penyebab konflik itu sendiri. Karna Mengabaikan norma aturan dan nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan suatu masyarakat, Salah satu penyebab munculnya suatu pragmatism masyarakat yaitu pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Menurut Siagian memberikan definisi tentang pembangunan yaitu “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Sementara Alexander, mendefinisikan pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya yang berlangsung pada level mikro atau Makro (*Nasional*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Oleh karena itu, konflik dan pembangunan menjadi dua sisi yang saling mempengaruhi. Melalui pembangunan konflik dalam masyarakat menjadi inheren, begitupun konflik terus menerus terjadi membingkai beberapa kelompok yang saling berebut kepentingan.

Seperti saat ini yang terjadi di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Dimana terjadinya permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat Kampung Pasir Konci tidak pernah menolak akan adanya pengusuran lahan tanah PJKA, tetapi masyarakat mengeluhkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pada pembangunan Kereta cepat Jakarta- Bandung tersebut. Karena tanah yang tergusur milik pribadi yang disertai dengan sertifikat sah diganti uang kompensasi berikut dengan bangunannya. Tetapi karena dampak dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tersebut banyak masyarakat yang merasa dirugikan mulai dari rumah rumah retak akibat getaran dan fasilitas sekolah yang rusak karna alat berat dan juga pengerjaan pembangunan kereta cepat yang tidak sesuai dengan SOP sehingga masyarakat banyak yang mengeluh akibat bisping yang ditimbulkan dari alat berat pada malam hari.

Keresahan ratusan warga tersebut diwakili oleh Bapak Adang Jaenudin selaku tokoh Masyarakat desa Pasir Sari, yang menyampaikan bahwa masyarakat tidak pernah diajak komunikasi tentang Standar Operasional Pengerjaan Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hasilnya, sedikitnya ada 30 bangunan rumah dan 5 fasilitas Umum seperti sekolah dan tempat Ibadah yang mengalami kerusakan akibat dampak dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Berangkat dari realitas kondisi diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut dampak sosial akibat pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan tersebut. Sehingga

menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan dari adanya pembangunan KCIC tersebut. Penelitian ini penulis mengangkat judul: “Pragmatisme Masyarakat dalam pembangunan Mega Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Studi Kasus Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang selatan Kabupaten Bekasi).

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan antara masyarakat dan pemerintah mengenai dampak dari pembangunan kereta cepat yakni banyaknya masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan tersebut berdampak besar kepada masyarakat sekitar yang tidak terdugur dimana banyak rumah-rumah yang rusak dan sekolah yang ambruk akibat alat berat pembangunan kereta cepat tersebut.

Bukan hanya itu, banyak juga masyarakat yang tidak nyaman karna bising yang ditimbulkan alat berat pengerjaan Kereta Cepat Jakarta Bandung pada malam hari. Masyarakat tidak pernah diajak komunikasi tentang SOP Pembangunan Kereta Cepat, dugaan masyarakat bahwa PT. Kereta Cepat Indonesia China telah melanggar kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Hingga kini banyak masyarakat yang kebisingan dan yang mengalami kerusakan rumah belum diberikan kompensasi yang layak oleh pihak PT. Kereta Cepat Indonesia Cina.

Dengan demikian, fokus penelitian dalam skripsi ini akan membahas bagaimana konflik yang terjadi akibat pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Konflik ini berupa konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa serta perusahaan/pengelola proyek pembangunan ini. KCI tersebut merupakan

bagian dari dampak sosial pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai sberikut;

1. Bagaimana dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung terhadap masyarakat di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat pragmatis terhadap pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana penyelesaian konflik terhadap ganti rugi kompensasi kerusakan akibat pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten bekasi. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung terhadap masyarakat di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten bekasi.

2. Untuk mengetahui penyebab pragmatism masyarakat terhadap pembangunan kereta cepat di Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten bekasi.
3. Mengetahui Penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten bekasi dengan pemerintah dan pihak Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diarahkan untuk memberikan dua manfaat dan kegunaan:

1. Manfaat Teoritis

Pertama manfaat dan kegunaan pada ranah teoritis dimana penelitian dalam skripsi ini berguna sebagai perspektif teoritis dalam memahami dan menganalisis persoalan terkait konflik akibat pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang berkaitan dengan masyarakat desa sebagai aktornya.

Analisa yang dihasilkan dari skripsi ini dapat memberikan perspektif alternatif terutama dalam kajian teori konflik yang selama ini lebih banyak menekankan pada konflik fisik. Sementara penelitian ini memberikan warna lain dalam memahami konflik sosial yang konstruktif dan structural yang melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat, pemerintahan, dan perusahaan atau pengelola sebuah proyek.

2. Manfaat Praktis

Kedua, manfaat secara praktis terletak pada upaya penelitian ini untuk menyusun sebuah model dan formula yang berguna untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh adanya pembangunan infrastruktur khususnya akses transportasi. Harapannya, model alternatif strategi menghadapi/resolusi konflik ini bisa diadopsi dan menjadi masukan tata kelola pemerintahan yang membangun, dan mengutamakan dialog, demi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

1.6. Kerangka Pemikiran

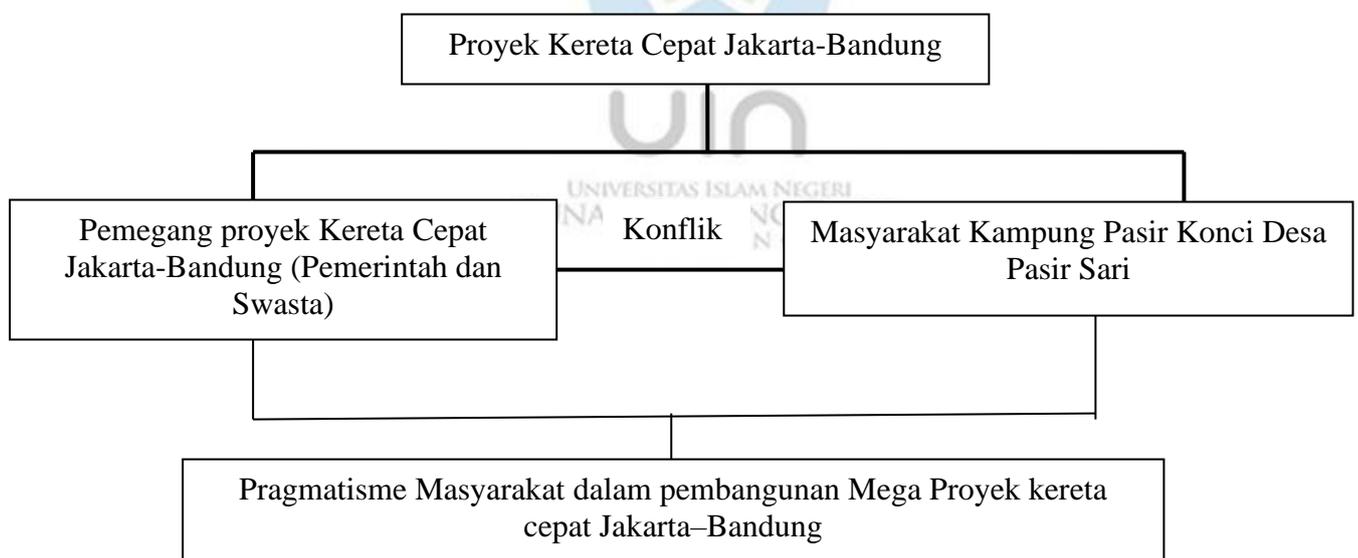
Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang besar berguna untuk memberikan mobilitas yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang berkerja di dua Kota Besar tersebut. Namun pembangunan kereta cepat ini memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang masuk daerah kereta cepat tersebut, salah satu daerah yang terdampak adalah Kampung Pasir Konci Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membuat masyarakat Kampung Pasir Konci menjadi pragmatisme. Pragmatisme yang dimaksud adalah masyarakat ingin menyelesaikan konfliknya itu hanya sebatas pada materil saja. Walaupun pragmatisme adalah kebenaran yang berorientasi pada sesuatu yang memiliki guna atau manfaat bagi kehidupan manusia.

Teori yang dipakai dalam permasalahan penelitian ini adalah teori konflik Ralf Dahrendorf dikarenakan Dahrendorf menganggap bahwa konflik sangat mengorganisasi sekali, ini dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing organisasinya. Proses ini merupakan bagian dari perubahan semu menjadi perubahan kepentingan berkelompok dan berdampak secara makro/

struktur. Bagi Dahrendorf, konflik sangat parsial. Bahkan ditentukan oleh organisasi-organisasi yang memiliki kelas dan itu diperebutkan dan dipertentangkan. Hakikatnya, ini adalah teori yang berasal pada hakikat sosiologis manusia yakni selalu ingin di deoan manusia lain (Margaret, 2007, hal. 45).

Permasalahan penelitian ini terjadi antara pemerintah yang membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dengan masyarakat Kampung Pasir Konci yang terdampak akan pembangunan tersebut. Hasilnya terjadi suatu konflik antara pemerintah dengan masyarakat, namun masyarakat terlihat pragmatis terhadap pembangunan tersebut sehingga mereka ingin menyelesaikan konflik ini hanya dengan hal yang materil saja. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti membuat suatu skema kerangka pemikiran dalam penelitian agar memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran